

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nining Karlina ¹; Sri Rusiyati ²

Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Nusa Mandiri,
Jakarta ¹²

Nkarlina011@gmail.com¹
sri.siq@nusamandiri.ac.id

(*) Nkarlina011@gmail.com¹



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Abstract—This study looks at how the Labor Force Participation Rate (LFPR) and economic growth influence the Open Unemployment Rate (OUR) in the regencies and cities of West Nusa Tenggara Province from 2020 to 2025, both on their own and together. This study uses a quantitative method and gathers data from the Central Bureau of Statistics (BPS) as secondary sources. The data includes information from 10 regencies or cities collected over a period of six years, with a total of 60 observations. Data analysis was done using multiple linear regression in SPSS, and hypothesis testing was carried out with t-test and F-test. The results indicate that the LFPR has a negative and significant impact on the OUR. The regression coefficient is -0.165, and the significance level is 0.000. Economic growth does not have a strong impact on the OUR, as shown by a coefficient of 0.039 and a significance level of 0.142. At the same time, both the LFPR and economic growth have a strong impact on the OUR, as shown by an F-statistic of 9.323 and a significance level of 0.000. The R Square value of 0.246 shows that the two independent variables account for 24.6% of the change in the OUR. The other 75.4% of the change is caused by factors that aren't included in the research model. The findings show that the LFPR has a significant role in lowering the OUR, but economic growth does not have a noticeable impact on the OUR in the regencies and cities of West Nusa Tenggara Province.

Keywords: Economic Growth, Labor Force Participation Rate, Open Unemployment Rate, West Nusa Tenggara

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020 hingga 2025, baik secara sendirian maupun bersamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan memakai data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan mencakup 10 daerah kabupaten atau kota selama jangka waktu enam tahun, dengan total 60 pengamatan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda melalui bantuan software SPSS, sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan uji t dan uji F. Penelitian menunjukkan bahwa TPAK berdampak negatif dan cukup signifikan terhadap TPT, dengan koefisiennya mencapai -0,165 dan tingkat signifikansinya 0,000. Pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak yang nyata terhadap TPT, dengan nilai koefisien 0,039 dan tingkat signifikansi 0,142. Secara bersamaan, TPAK dan pertumbuhan ekonomi memengaruhi TPT secara signifikan, dengan nilai F hitung sebesar 9,323 dan tingkat signifikansi 0,000. Nilai R Square sebesar 0,246 menunjukkan kedua variabel independen mampu menjelaskan 24,6%

perubahan TPT, sedangkan 75,4% perubahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa TPAK berperan penting dalam mengurangi TPT, sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya berdampak sebagian kecil terhadap TPT di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nusa Tenggara Barat*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang berlangsung secara berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Konsep pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pertumbuhan ekonomi karena tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan dan output, tetapi juga mencakup perubahan struktur perekonomian, perluasan kesempatan kerja, pemerataan hasil pembangunan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila peningkatan aktivitas ekonomi mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam jangka panjang (World Bank, 2024).

Menurut Sukirno (2016), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat mengalami peningkatan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Proses tersebut berlangsung seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi dan perubahan struktur perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan produksi semata belum dapat dijadikan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, perubahan struktur ekonomi, serta meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi memiliki dimensi kuantitatif dan kualitatif yang saling berkaitan.

Perspektif tersebut dapat diperkuat melalui **teori perubahan struktural** yang dikembangkan oleh Arthur Lewis. Teori Lewis menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dalam negara berkembang berkaitan dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional yang memiliki produktivitas relatif rendah menuju sektor modern yang mempunyai

produktivitas lebih tinggi. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas kegiatan ekonomi, dan pada akhirnya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Kajian mengenai ekonomi Indonesia juga menunjukkan bahwa transformasi struktural ditandai oleh perubahan distribusi tenaga kerja antarsektor dan pergeseran aktivitas ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor nonpertanian (Nanga & Widjaja, 2024).

Teori perubahan struktural menjadi relevan karena pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan output, tetapi juga mengubah komposisi kegiatan ekonomi dan pola penggunaan tenaga kerja. Dalam proses tersebut, perpindahan tenaga kerja menuju sektor yang memiliki produktivitas lebih tinggi dapat menjadi salah satu sumber peningkatan kesejahteraan. Namun, perubahan struktur ekonomi tidak selalu berlangsung dengan kecepatan yang sama pada setiap negara atau daerah. Nanga dan Widjaja (2024) menunjukkan bahwa transformasi struktur pekerjaan di Indonesia berlangsung lebih lambat dibandingkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga peningkatan output ekonomi tidak selalu diikuti oleh perubahan kesempatan kerja dalam kecepatan yang sama.

Selain teori perubahan struktural, pembangunan ekonomi juga dapat dipahami melalui **pendekatan kapabilitas (capability approach)** yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Pendekatan ini memandang pembangunan tidak semata-mata berdasarkan peningkatan pendapatan, tetapi berdasarkan kemampuan dan kebebasan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang mereka nilai berharga. Dengan perspektif tersebut, kesempatan memperoleh pekerjaan, pendidikan, pendapatan yang layak, dan akses terhadap berbagai sumber daya merupakan bagian dari kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahterannya. Kajian terbaru mengenai pendekatan kapabilitas kembali menegaskan bahwa kualitas pembangunan seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan indikator ekonomi, tetapi juga berdasarkan perluasan kesempatan dan kemampuan manusia dalam menentukan kehidupannya (Deneulin, 2024).

Pandangan Smith (2017) juga menempatkan pembangunan sebagai proses yang melibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk struktur sosial, kelembagaan, serta pola perilaku masyarakat. Dalam perspektif tersebut, pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial dan kelembagaan yang mendukung aktivitas ekonomi. Pembangunan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan ekonomi sekaligus perubahan sosial dan kelembagaan.

Keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan dapat dijelaskan melalui kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja. Ketika aktivitas produksi meningkat, permintaan terhadap faktor-faktor produksi, termasuk tenaga kerja, secara teoritis dapat mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya tidak hanya tercermin dalam peningkatan output daerah, tetapi juga dalam meningkatnya kemampuan perekonomian menyediakan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam perspektif pembangunan, penciptaan pekerjaan menjadi penting karena memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan produktif.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja juga dapat dikaitkan dengan teori perubahan struktural Lewis. Ketika sektor modern berkembang dan kegiatan produksi semakin luas, kebutuhan terhadap tenaga kerja dapat meningkat sehingga tenaga kerja dari sektor tradisional memiliki kesempatan untuk berpindah ke sektor yang lebih produktif. Studi mengenai transformasi struktural di negara berkembang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kemampuan suatu perekonomian mengalihkan tenaga kerja menuju kegiatan yang memiliki produktivitas lebih tinggi (Sen, 2019). Namun demikian, proses tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik sektor ekonomi, kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan kapasitas penciptaan lapangan kerja.

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan memiliki keterkaitan yang penting untuk dikaji. Penelitian Widiyanti et al. (2024) mengenai NTB menunjukkan bahwa persoalan pengangguran merupakan salah satu

aspek penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Penelitian tersebut menganalisis hubungan tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, dan upah minimum terhadap pengangguran pada sepuluh kabupaten/kota di NTB. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa perkembangan pasar tenaga kerja merupakan bagian penting dalam memahami keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan beberapa teori tersebut, pembangunan ekonomi dalam penelitian ini dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas perekonomian yang tidak hanya ditunjukkan melalui pertumbuhan output, tetapi juga melalui perubahan struktur ekonomi, peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teori perubahan struktural menjelaskan pentingnya pergeseran tenaga kerja menuju sektor yang lebih produktif, sedangkan pendekatan kapabilitas menempatkan peningkatan kesempatan dan kemampuan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini menjadi salah satu aspek penting untuk melihat sejauh mana perkembangan aktivitas ekonomi berkaitan dengan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Naskah Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses berkelanjutan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai hanya melalui peningkatan output atau pendapatan regional, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan perekonomian dalam menyediakan kesempatan kerja yang produktif. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perluasan kesempatan kerja akan memberikan manfaat yang lebih luas karena peningkatan aktivitas produksi dapat diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan berbagai permasalahan sosial-ekonomi, termasuk pengangguran. Pandangan tersebut sejalan dengan World Bank (2024) yang menekankan pentingnya transformasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan perubahan struktur ekonomi agar pertumbuhan dapat menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih luas.

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan ekonomi karena keterlibatan tenaga kerja memungkinkan proses produksi barang dan jasa berlangsung. Perubahan jumlah penduduk yang memasuki pasar kerja akan memengaruhi sisi penawaran

tenaga kerja, sedangkan perkembangan kegiatan ekonomi akan menentukan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja tersebut. International Labour Organization (ILO, 2024) menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah pekerjaan yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas pekerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta kemampuan perekonomian menciptakan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, perkembangan ketenagakerjaan perlu dianalisis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan ekonomi.

Salah satu persoalan utama dalam pasar tenaga kerja adalah pengangguran. Pengangguran menunjukkan kondisi ketika individu yang termasuk dalam angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan sesuai dengan kondisi pasar kerja. Tingginya pengangguran dapat mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kesempatan kerja yang dapat disediakan oleh perekonomian. ILO (2025) juga menegaskan bahwa perlambatan aktivitas ekonomi dapat memberikan tekanan terhadap penciptaan lapangan kerja, sementara ketidaksesuaian antara karakteristik tenaga kerja dan kebutuhan pasar dapat memperbesar tantangan ketenagakerjaan.

Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut menjadi semakin penting karena karakteristik pasar kerja berbeda antarwilayah. Perbedaan struktur ekonomi, produktivitas, investasi, pendidikan, serta sektor yang dominan dapat menyebabkan kemampuan setiap daerah dalam menyerap tenaga kerja tidak sama. World Bank (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih terkonsentrasi pada sektor dengan produktivitas relatif rendah, sedangkan sektor dengan produktivitas sangat tinggi menyerap proporsi tenaga kerja yang jauh lebih kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan output ekonomi belum tentu menghasilkan peningkatan kesempatan kerja dalam proporsi yang sama.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator tersebut menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau memenuhi kriteria pengangguran sesuai konsep statistik ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, TPT dapat digunakan untuk melihat kemampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja. Semakin tinggi TPT, semakin besar proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Sebaliknya, penurunan TPT dapat menjadi

indikasi adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja, meskipun indikator tersebut tetap perlu dibaca bersama indikator ketenagakerjaan lainnya (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025).

Selain TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting untuk menggambarkan keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja. TPAK menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, baik mereka yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian, peningkatan TPAK mencerminkan bertambahnya penduduk usia kerja yang menawarkan tenaga mereka di pasar kerja. Namun, peningkatan partisipasi tersebut tidak secara otomatis menyebabkan pengangguran turun karena dampaknya sangat bergantung pada kemampuan perekonomian menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai.

Hubungan antara TPAK dan TPT dapat dijelaskan melalui mekanisme penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika semakin banyak penduduk memasuki pasar kerja, jumlah tenaga kerja yang tersedia meningkat. Apabila pertambahan tersebut dapat diimbangi dengan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan TPAK dapat berjalan bersama dengan penurunan pengangguran. Sebaliknya, apabila penciptaan lapangan kerja lebih lambat daripada pertumbuhan angkatan kerja, tambahan tenaga kerja dapat meningkatkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan dan pada akhirnya meningkatkan pengangguran. Oleh karena itu, arah hubungan antara TPAK dan TPT tidak dapat diasumsikan sama untuk seluruh daerah.

Temuan Widiantri, Sahri, dan Suriadi (2024) memperlihatkan pentingnya hubungan tersebut dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian yang menggunakan sepuluh kabupaten/kota di NTB selama 2017–2021 dengan pendekatan regresi data panel menunjukkan bahwa TPAK, jumlah penduduk, dan upah minimum memiliki keterkaitan dengan pengangguran. Hasil penelitian tersebut menjadi relevan karena menunjukkan bahwa dinamika pengangguran di NTB perlu dilihat dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah, bukan hanya menggunakan gambaran agregat provinsi.

Hasil yang lebih baru juga menunjukkan bahwa hubungan TPAK dan TPT dapat ditemukan pada wilayah lain. Penelitian mengenai kabupaten/kota di Jawa Timur pada 2024 menemukan adanya hubungan negatif antara TPAK dan TPT, yang menunjukkan bahwa peningkatan keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat berjalan bersamaan dengan penurunan tingkat pengangguran ketika

kondisi pasar kerja mampu menyerap tambahan angkatan kerja (Musytari, 2024). Sementara itu, Aulya et al. (2025) menganalisis 33 provinsi di Indonesia dan menempatkan TPAK sebagai salah satu variabel yang relevan dalam menjelaskan TPT bersama dengan investasi dan pengeluaran rumah tangga.

Variabel lain yang secara teoritis berkaitan dengan pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kegiatan produksi biasanya meningkatkan kebutuhan terhadap input produksi, termasuk tenaga kerja. Oleh karena itu, ketika aktivitas ekonomi meningkat, kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja secara teoritis dapat meningkat sehingga tingkat pengangguran berpotensi menurun. Hubungan tersebut dikenal melalui Hukum Okun yang menjelaskan kecenderungan hubungan berlawanan antara pertumbuhan output dan tingkat pengangguran. Namun, kekuatan hubungan tersebut dapat berbeda menurut karakteristik ekonomi, struktur industri, serta kondisi pasar tenaga kerja suatu wilayah.

Penelitian terbaru di Indonesia memberikan dukungan terhadap hubungan tersebut. Suparta (2024), melalui penelitian terhadap 34 provinsi di Indonesia periode 2014–2022, menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Temuan tersebut memberikan dukungan empiris terhadap Hukum Okun dalam konteks Indonesia. Hasil yang sejalan ditemukan oleh Parulian et al. (2025) melalui pengujian Hukum Okun di kawasan Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan PDB riil sebesar 1 persen berkaitan dengan penurunan tingkat pengangguran sekitar 0,06 persen di Indonesia.

Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran juga ditemukan dalam penelitian regional. Asmawati et al. (2025) menganalisis 154 kabupaten/kota di Pulau Sumatra selama periode 2017–2023 dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif serta signifikan terhadap pengangguran. Hasil tersebut mendukung penerapan Hukum Okun pada tingkat regional, sekaligus menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan perubahan tingkat pengangguran. Penelitian lain mengenai Jawa Timur juga menemukan adanya hubungan berlawanan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran setelah periode pandemi, meskipun kekuatan hubungan tersebut berubah sesuai periode pengamatan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan dampak ketenagakerjaan yang identik di setiap wilayah. Aginta, Mendez, dan Someya (2025) dalam kajian terhadap 514 kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan pentingnya memperhatikan karakteristik regional ketika menganalisis Hukum Okun. Perbedaan karakteristik daerah dapat menyebabkan hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki kekuatan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian pada tingkat kabupaten/kota menjadi penting karena analisis agregat provinsi dapat menyembunyikan variasi kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan antarwilayah.

Fenomena tersebut menjadi semakin menarik ketika diterapkan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data BPS, perekonomian NTB pada 2024 tumbuh sebesar 5,30 persen dibandingkan 2023. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 11,66 persen. Struktur pertumbuhan tersebut perlu diperhatikan karena sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan output belum tentu memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang sama dengan sektor padat karya (BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan besarnya pertumbuhan PDRB, tetapi juga berdasarkan sumber pertumbuhan dan keterkaitannya dengan pasar kerja. World Bank (2025) menunjukkan bahwa sektor ekstraktif di Indonesia dapat menghasilkan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi, tetapi kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja relatif kecil. Hal ini relevan dengan karakteristik ekonomi NTB yang pada 2024 memperoleh pertumbuhan produksi terbesar dari pertambangan dan penggalian. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat langsung diartikan sebagai peningkatan kesempatan kerja dalam jumlah yang sebanding.

Dinamika pasar kerja NTB juga menunjukkan perubahan yang cukup kuat. Pada Agustus 2024, jumlah angkatan kerja NTB mencapai sekitar 3,19 juta orang atau meningkat sekitar 216,34 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Pada periode yang sama, TPAK meningkat menjadi 77,23 persen, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja mencapai sekitar 3,11 juta orang. TPT juga menurun menjadi 2,73 persen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi penduduk dalam pasar

kerja pada 2024 berlangsung bersamaan dengan perbaikan indikator pengangguran (BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025).

Perkembangan tersebut dapat dilihat lebih jelas apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. TPAK NTB meningkat dari 70,57 persen pada 2021 menjadi 70,93 persen pada 2022, kemudian mencapai 73,31 persen pada 2023 dan 77,23 persen pada 2024. Pada periode yang sama, TPT mengalami penurunan dari 3,01 persen pada 2021 menjadi 2,89 persen pada 2022, 2,80 persen pada 2023, dan 2,73 persen pada 2024. Pola tersebut menunjukkan adanya fenomena empiris yang menarik, yaitu peningkatan partisipasi angkatan kerja terjadi bersamaan dengan penurunan tingkat pengangguran (BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025).

Walaupun demikian, hubungan tersebut belum dapat langsung dipahami sebagai hubungan sebab-akibat. Penurunan TPT dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan, upah, struktur lapangan usaha, perubahan demografi, maupun kebijakan ketenagakerjaan. ILO (2025) menekankan bahwa kondisi pasar kerja dipengaruhi oleh berbagai tekanan struktural dan perubahan ekonomi sehingga indikator pengangguran perlu dianalisis bersama indikator ketenagakerjaan lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara TPAK, pertumbuhan ekonomi, dan TPT perlu diuji secara empiris menggunakan metode statistik.

Penelitian mengenai NTB juga memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi dan pengangguran mempunyai karakteristik yang spesifik. Sinurat (2024) menganalisis hubungan kemiskinan, IPM, dan pengangguran terhadap PDRB NTB selama 2016–2023. Hasilnya menunjukkan bahwa kemiskinan dan IPM berpengaruh signifikan terhadap PDRB, sedangkan pengangguran tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara indikator ketenagakerjaan dan kinerja ekonomi NTB tidak selalu sederhana serta perlu dikaji dengan pemilihan variabel dan model yang tepat.

Penelitian Rahmawati, Fadliyanti, dan Husni (2025) mengenai generasi Z di NTB juga menunjukkan adanya persoalan pasar kerja yang lebih luas. Penelitian tersebut membahas faktor-faktor yang berkaitan dengan kelompok NEET, yaitu penduduk muda yang tidak sedang bekerja, tidak sedang menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan. Keberadaan kelompok tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan jumlah penganggur, tetapi juga dengan

kemampuan sistem ekonomi dan pendidikan dalam menghubungkan penduduk usia produktif dengan aktivitas ekonomi.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Rahmayani et al. (2025) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan data panel 2018–2022. Penelitian tersebut secara langsung memasukkan TPAK dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang digunakan untuk menjelaskan TPT. Kesamaan struktur variabel tersebut memperkuat relevansi penggunaan TPAK dan pertumbuhan ekonomi dalam menganalisis pengangguran regional, meskipun karakteristik ekonomi Sulawesi Tenggara berbeda dengan NTB.

Studi Luron, Kumenaung, dan Kawung (2025) juga memberikan temuan yang perlu diperhatikan. Dengan menggunakan data Provinsi Sulawesi Utara periode 2011–2024, penelitian tersebut menguji IPM, TPAK, dan TPT sebagai faktor yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPAK dan TPT tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antarindikator ekonomi dan ketenagakerjaan dapat berubah ketika dianalisis dalam konteks wilayah dan arah hubungan yang berbeda.

Penelitian Sari et al. (2024) di Pulau Kalimantan juga memperlihatkan bahwa TPT dapat diposisikan sebagai bagian dari hubungan yang lebih luas antara pasar kerja dan pembangunan ekonomi. Penelitian tersebut menganalisis IPM, TPT, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi selama 2014–2023. Kajian tersebut memperkuat pandangan bahwa indikator pengangguran tidak dapat dilepaskan dari kondisi pembangunan manusia dan kinerja ekonomi suatu wilayah. Sementara itu, Lestari et al. (2024) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi TPT di Provinsi Banten selama 2020–2023, sehingga memberikan bukti tambahan bahwa karakteristik regional perlu diperhitungkan ketika menjelaskan perubahan pengangguran.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa hasil penelitian mengenai hubungan TPAK, pertumbuhan ekonomi, dan TPT belum menunjukkan pola yang sepenuhnya seragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan penurunan pengangguran sesuai dengan Hukum Okun, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh tersebut dapat lemah atau tidak signifikan. Perbedaan hasil juga dapat muncul

pada hubungan TPAK dan TPT karena peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat menjadi peluang ekonomi apabila tersedia lapangan kerja yang memadai, tetapi dapat pula meningkatkan tekanan terhadap pasar kerja apabila penciptaan pekerjaan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.

Karakteristik ekonomi NTB semakin memperkuat pentingnya penelitian tersebut. Provinsi ini memiliki struktur ekonomi yang melibatkan sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, jasa, konstruksi, serta pertambangan. Perbedaan sektor dominan antarwilayah dapat menyebabkan kemampuan penciptaan lapangan kerja berbeda antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang sama besarnya belum tentu menghasilkan perubahan TPT yang sama pada setiap wilayah. Pendekatan kabupaten/kota diperlukan agar variasi tersebut dapat ditangkap secara lebih baik dalam analisis.

Penggunaan data panel pada sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi relevan karena pendekatan tersebut memungkinkan penelitian mengamati perubahan variabel dari waktu ke waktu sekaligus memperhatikan perbedaan karakteristik antarwilayah. Widiyanti et al. (2024) sebelumnya juga menggunakan sepuluh kabupaten/kota di NTB dengan pendekatan data panel untuk menganalisis pengangguran. Kesamaan wilayah tersebut memberikan dasar empiris, sedangkan penelitian ini memperluas analisis dengan memasukkan pertumbuhan ekonomi bersama TPAK sebagai variabel independen.

Periode 2019–2024 juga memiliki nilai strategis karena mencakup masa sebelum pandemi, periode pandemi COVID-19, serta fase pemulihan ekonomi. Pandemi menyebabkan perubahan aktivitas produksi, kesempatan kerja, mobilitas tenaga kerja, dan keputusan penduduk untuk masuk atau keluar dari pasar kerja. Dengan menggunakan periode tersebut, penelitian dapat melihat dinamika TPAK, pertumbuhan ekonomi, dan TPT dalam kondisi ekonomi yang berbeda. Hal ini sejalan dengan laporan ILO (2024) yang menunjukkan bahwa pemulihan pasar tenaga kerja setelah pandemi berlangsung tidak merata antarwilayah dan kelompok pekerja.

Perubahan indikator NTB setelah periode pandemi memberikan alasan empiris tambahan untuk melakukan penelitian. Pada 2024, peningkatan TPAK berlangsung bersamaan dengan penurunan TPT, sementara pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 5,30 persen. Namun, kondisi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa peningkatan TPAK

atau pertumbuhan ekonomi secara langsung menyebabkan penurunan pengangguran. Hubungan tersebut masih harus diuji dengan mempertimbangkan data seluruh kabupaten/kota dan periode penelitian secara sistematis.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang dapat dikaji lebih lanjut. Penelitian Widiyanti et al. (2024) telah mengkaji TPAK, jumlah penduduk, dan upah minimum terhadap pengangguran di NTB, sedangkan penelitian lain telah menguji pertumbuhan ekonomi dan pengangguran pada berbagai wilayah di Indonesia. Namun, kajian yang secara khusus menggabungkan TPAK dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dalam menjelaskan TPT pada sepuluh kabupaten/kota di NTB dengan periode pengamatan 2019–2024 masih relevan untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat hanya dipandang dari jumlah penduduk yang belum memperoleh pekerjaan. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan seberapa besar penduduk usia kerja berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja dan sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu menghasilkan kesempatan kerja. Peningkatan TPAK dapat menjadi kekuatan bagi perekonomian apabila dapat diserap oleh pasar kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi akan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat apabila peningkatan output diikuti oleh perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas.

Fenomena empiris NTB menunjukkan bahwa TPAK meningkat dari 70,57 persen pada 2021 menjadi 77,23 persen pada 2024, sedangkan TPT turun dari 3,01 persen menjadi 2,73 persen pada periode yang sama. Pada 2024, ekonomi NTB juga tumbuh sebesar 5,30 persen, dengan pertumbuhan produksi tertinggi berasal dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 11,66 persen. Kombinasi perubahan tersebut memberikan fenomena yang menarik untuk diuji karena peningkatan partisipasi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan pengangguran terjadi pada periode yang sama (BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2019–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan antara partisipasi

penduduk dalam pasar kerja, perkembangan aktivitas ekonomi, dan tingkat pengangguran pada tingkat regional. Selain memberikan kontribusi akademik terhadap kajian ekonomi ketenagakerjaan, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pertumbuhan ekonomi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel melalui pengolahan data secara statistik. Penggunaan pendekatan ini juga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi pasar tenaga kerja dan perkembangan ekonomi pada masing-masing wilayah yang diamati.

Objek penelitian mencakup 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan periode pengamatan 2019–2024. Pemilihan periode tersebut mempertimbangkan adanya perubahan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebelum, selama, serta setelah pandemi COVID-19. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pasar kerja, kesempatan kerja, dan tingkat pengangguran. Selain itu, karakteristik ekonomi antarkabupaten/kota di NTB relatif beragam, sehingga analisis pada tingkat daerah diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih spesifik.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi dan basis data Badan Pusat Statistik (BPS). Data penelitian meliputi TPAK, TPT, dan pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penggunaan data sekunder dipilih karena indikator yang digunakan telah tersedia dalam publikasi statistik resmi sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada setiap kabupaten/kota selama periode penelitian.

Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi data antarwilayah (cross section) dan data antarwaktu (time series). Dengan demikian, unit analisis penelitian terdiri atas 10 kabupaten/kota yang diamati selama enam tahun sehingga diperoleh 60 observasi.

Penggunaan data panel memungkinkan penelitian untuk mempertimbangkan variasi karakteristik masing-masing daerah sekaligus perubahan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Pendekatan ini relevan karena kondisi pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja tidak selalu menunjukkan pola yang sama pada setiap wilayah.

Variabel independen dalam penelitian terdiri atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK digunakan untuk menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam pasar kerja, baik sebagai penduduk yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi daerah melalui perubahan PDRB, sedangkan TPT digunakan untuk menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel. Tahapan analisis mencakup pengujian statistik deskriptif, pemilihan model regresi panel yang sesuai, serta pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh TPAK dan pertumbuhan ekonomi terhadap TPT, baik secara parsial maupun simultan. Penggunaan regresi data panel diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif karena mempertimbangkan dimensi wilayah dan waktu secara bersamaan.

Model penelitian secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT_{it} = \alpha + \beta_1 TPAK_{it} + \beta_2 PE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka pada wilayah i dan tahun t
- α = konstanta
- β_1, β_2 = koefisien regresi
- $TPAK_{it}$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada wilayah i dan tahun t
- PE_{it} = pertumbuhan ekonomi pada wilayah i dan tahun t
- ε_{it} = error term

Selanjutnya, hasil estimasi digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya hubungan antara TPAK serta pertumbuhan ekonomi terhadap TPT. Analisis tersebut juga digunakan untuk menguji apakah peningkatan partisipasi angkatan kerja dan perkembangan aktivitas ekonomi daerah berkaitan dengan perubahan tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Hal ini penting karena peningkatan aktivitas ekonomi tidak selalu menghasilkan penyerapan tenaga kerja dengan tingkat yang sama pada setiap wilayah, terutama karena adanya perbedaan struktur ekonomi dan karakteristik sektor usaha daerah.

Dengan rancangan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai kondisi ketenagakerjaan di NTB serta menjelaskan keterkaitan antara partisipasi angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran pada tingkat kabupaten/kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis keterkaitan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan pertumbuhan ekonomi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2025. Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, diperoleh 60 observasi yang selanjutnya dianalisis melalui statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, serta regresi linear berganda.

Secara deskriptif, TPAK memiliki nilai rata-rata sebesar 73,08 persen dengan rentang pengamatan antara 63 hingga 81 persen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja memiliki perbedaan antarwilayah dan periode pengamatan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan variasi yang lebih besar, dengan nilai rata-rata 3,22 persen, nilai terendah -7 persen, dan tertinggi 29 persen. Sementara itu, TPT memiliki rata-rata sebesar 3,32 persen, dengan nilai minimum 0 persen dan maksimum 7 persen. Perbedaan tersebut menggambarkan bahwa karakteristik pasar kerja dan perkembangan ekonomi di setiap kabupaten/kota tidak sepenuhnya seragam.

Variasi pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya menjadi salah satu temuan penting. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan dinamika aktivitas ekonomi antarwilayah selama periode penelitian. Rentang pengamatan 2020–2025 juga mencakup periode ketika perekonomian mengalami tekanan akibat pandemi dan kemudian memasuki tahap pemulihan. Dengan demikian, perkembangan ekonomi daerah selama periode tersebut tidak berlangsung secara linier.

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam analisis

lebih lanjut. Uji normalitas menghasilkan nilai signifikansi 0,200, sehingga residual dapat dinyatakan berdistribusi normal. Pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance sebesar 0,973 dan VIF sebesar 1,028 pada kedua variabel independen. Nilai tersebut menunjukkan tidak adanya persoalan korelasi linear yang berlebihan antarvariabel bebas. Selanjutnya, pengujian heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi 0,127 untuk TPAK dan 0,897 untuk pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak ditemukan indikasi heteroskedastisitas. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,735 juga berada di antara batas dU sebesar 1,6518 dan 4-dU sebesar 2,3482, sehingga model tidak menunjukkan gejala autokorelasi.

Hasil regresi linear berganda menghasilkan persamaan:

$$\text{TPT} = 15,249 - 0,165 \text{ TPAK} + 0,039$$

Pertumbuhan Ekonomi

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa TPAK memiliki arah hubungan negatif dengan TPT, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan positif. Namun, arah koefisien tidak secara otomatis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan sehingga interpretasi selanjutnya perlu mempertimbangkan hasil pengujian parsial.

TPAK terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT. Koefisien sebesar -0,165, nilai t sebesar -4,244, dan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan pada tingkat 5 persen. Artinya, peningkatan partisipasi penduduk usia kerja dalam angkatan kerja berkaitan dengan kecenderungan menurunnya tingkat pengangguran terbuka, dengan variabel lain dalam model dianggap konstan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan penduduk dalam pasar tenaga kerja tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja, tetapi juga dapat mencerminkan meningkatnya kemampuan pasar kerja dalam menyediakan aktivitas ekonomi bagi penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja. Dalam konteks kabupaten/kota di NTB, kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan partisipasi ekonomi masyarakat yang diikuti oleh kapasitas penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan TPAK akan lebih memberikan dampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan apabila tersedia kesempatan kerja yang memadai.

Hasil tersebut juga dapat dipahami melalui perspektif pembangunan ekonomi yang menempatkan tenaga kerja sebagai salah satu unsur penting dalam proses transformasi

ekonomi. Meningkatnya partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat memperbesar keterlibatan masyarakat dalam proses produksi sekaligus memperluas peluang memperoleh pendapatan. Oleh karena itu, temuan negatif dan signifikan antara TPAK dan TPT menunjukkan bahwa aspek ketenagakerjaan memiliki peranan yang lebih nyata dalam menjelaskan perubahan pengangguran dibandingkan pertumbuhan ekonomi dalam model penelitian ini.

Berbeda dengan TPAK, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap TPT. Variabel tersebut memiliki koefisien sebesar 0,039 dengan nilai t sebesar 1,488 dan tingkat signifikansi 0,142. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, perubahan pertumbuhan ekonomi belum dapat dinyatakan mempunyai pengaruh yang nyata terhadap TPT selama periode penelitian.

Koefisien yang bernilai positif perlu dipahami secara hati-hati. Hasil tersebut hanya menggambarkan arah hubungan yang diperoleh dari model dan bukan berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi secara statistik terbukti meningkatkan pengangguran. Tidak signifikannya hubungan tersebut menunjukkan bahwa perubahan output ekonomi belum secara konsisten diikuti oleh perubahan tingkat pengangguran terbuka.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah tidak selalu menghasilkan tambahan kesempatan kerja dalam proporsi yang sama. Peningkatan aktivitas ekonomi dapat terkonsentrasi pada sektor tertentu yang memiliki produktivitas tinggi tetapi tidak membutuhkan tambahan tenaga kerja dalam jumlah besar. Selain itu, perbedaan struktur ekonomi antarkabupaten/kota serta perubahan aktivitas ekonomi selama pandemi dan masa pemulihan dapat menyebabkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pasar kerja menjadi tidak seragam.

Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan indikator ekonomi makro daerah saja belum cukup untuk menjelaskan perubahan pengangguran. Kualitas pertumbuhan, struktur lapangan usaha, kemampuan sektor ekonomi menyerap tenaga kerja, serta karakteristik tenaga kerja menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami kondisi ketenagakerjaan daerah.

Secara simultan, TPAK dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap TPT. Hasil uji F menghasilkan nilai F sebesar 9,323 dengan signifikansi 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki kemampuan statistik dalam menjelaskan

perubahan TPT. Temuan ini memperlihatkan bahwa kondisi pengangguran terbuka tidak dapat dilepaskan hanya dari satu aspek, tetapi berkaitan dengan kombinasi karakteristik partisipasi tenaga kerja dan perkembangan ekonomi daerah.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,246 menunjukkan bahwa sekitar 24,6 persen variasi TPT dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh TPAK dan pertumbuhan ekonomi dalam model. Sementara itu, sekitar 75,4 persen variasi lainnya berada di luar model penelitian. Besarnya proporsi yang belum dapat dijelaskan menunjukkan bahwa pengangguran merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, seperti pendidikan, keterampilan, upah, investasi, struktur lapangan usaha, jumlah penduduk usia kerja, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan penciptaan lapangan pekerjaan.

Variabel	Koefisien	t hitung	Sig.	Kesimpulan
TPAK	-0,165	-4,244	0	Berpengaruh negatif dan signifikan
Pertumbuhan ekonomi	0,039	1,488	0,142	Tidak berpengaruh signifikan
TPAK + Pertumbuhan ekonomi	—	$F = 9,323$	0	Berpengaruh simultan
Model	$R^2 = 0,246$	—	—	Menjelaskan 24,6% variasi TPT

Tabel X. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Pengaruh TPAK dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap TPT

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa TPAK merupakan variabel yang lebih dominan dalam menjelaskan TPT dibandingkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tercermin dari standardized coefficient beta TPAK sebesar -0,495, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,173. Temuan ini mengarah pada pentingnya kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada peningkatan keterlibatan penduduk dan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dipandang tidak hanya dari peningkatan output daerah, tetapi juga dari kemampuan pertumbuhan tersebut menghasilkan manfaat ketenagakerjaan. Penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan sektor-sektor yang memiliki

kapasitas penyerapan tenaga kerja dapat menjadi bagian penting dalam upaya menekan pengangguran terbuka secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Mankiw, N. G. (2016). *Makro Ekonomi* (Keenam). Erlangga.
- Parulian, F. E. D., Simbolon, R. L., Wulandari, Y. N., & Budiasih, B. (2025). *Pembuktian Empiris Okun's Law dalam Permasalahan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle)*. *Ekono Insentif*, 19(1), 37–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.36787/jei.v19i1.1612>
- Ratih, & Arivina. (2019). *Hukum OKUN: Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia*. 37–44.
- Smith, G. (2017). *Okun's law revisited*, *Quarterly Review of Economics and Business*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Edisi ke-1). Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Mikroekonomi teori pengantar* (ketiga). RajaGrafindo Persada.
- Widiantari, I. A. A., Sahri, & Suriadi, I. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk, dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.29303/oportunitas.v3i1.607>
- Zulfiah Putri Rahmayani. (2025). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Dan Angkatan Kerja Terhadap Pengangguran Di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 10(1), 380–392.
- Astari, M., Hamzah, L. M., & Ratih, A. (2019). Hukum OKUN: Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 37–44. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i1.32> | Jurnal FEB Unila+1
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025). *Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat triwulan IV-2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. BBPS Nusa Tenggara Barat
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025). *Statistik daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2025*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. BBPS Web API
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat Agustus 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data tersebut mencatat TPAK sebesar 77,23% dan TPT sebesar 2,73% pada Agustus 2024. BBPS Web API
- Parulian, F. E. D., Simbolon, R. L., Wulandari, Y. N., & Budiasih, B. (2025). Pembuktian empiris Okun's Law dalam permasalahan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi (Studi kasus negara Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle). *Ekono Insentif*, 19(1), 37–48. <https://doi.org/10.36787/jei.v19i1.1612> | Jurnal LLDIKTI 4+1
- Rahmayani, Z. P., Syarif, M., Suriadi, L. O., Nur, S., & Rumbia, W. A. (2025). Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 380–392. <https://doi.org/10.33772/jpep.v10i1.962> | Jurnal UHO+1
- Widiantari, I. A. A., Sahri, & Suriadi, I. (2024). Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, dan upah minimum terhadap pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017–2021. *Jurnal Oportunitas: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 58–64. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v3i1.607>